

PERAN KEPEMIMPINAN ADAT “NINIAK MAMAK” PADA PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DI MINANGKABAU

LUSI PUSPIKA SARI*, ILHAM HAVIFI

Universitas Andalas

Email: lusipuspika@soc.unand.ac.id*

Abstract: *Political behavior reflects the participation of society in the processes of political decision-making and public policy. In Minangkabau society, traditional figures such as niniak mamak are considered to play a significant role in shaping political tendencies and orientations. This influence is both symbolic and practical, mobilizing political support and influencing electoral choices. This study aims to analyze the influence of the role of niniak mamak on the political behavior of the Minangkabau people. The research employs a qualitative approach through literature studies. The findings indicate that the political behavior of the Minangkabau community is highly collective and rooted in customary traditions, influenced by traditional leadership structures, particularly niniak mamak, who are regarded as informal elites. This role is evident in election practices, local elections (pemilihan kepala daerah), customary deliberations, and decision-making processes within the customary community*

Keywords: *Political Behavior; Minangkabau Society; Niniak Mamak; Traditional Leadership*

Abstrak: Perilaku politik menggambarkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Masyarakat Minangkabau menganggap aktor adat seperti *niniak mamak* mempunyai peran penting dalam membentuk kecenderungan dan orientasi politik masyarakat. Pengaruh ini bersifat simbolik dan juga praktis dan memobilisasi dukungan politik dan menentukan pilihan dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran *niniak mamak* pada perilaku politik masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Minangkabau sangat kolektif dan berbasis adat dan dipengaruhi oleh struktur kepemimpinan tradisional, khususnya *niniak mamak* yang dipandang sebagai elit informal. Peran ini tercermin dalam praktek pemilu, pilkada, musyawarah adat dan proses pengambilan keputusan dalam komunitas adat.

Kata Kunci: Perilaku Politik; *Niniak Mamak*; Kepemimpinan Tradisional; Masyarakat Minangkabau.

A. Pendahuluan

Perilaku politik merupakan bagian penting dalam ilmu politik, merujuk pada bagaimana individu dan kelompok masyarakat bertindak dalam sistem politik, termasuk dalam memberikan suara, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mendukung kebijakan atau kandidat tertentu. Dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur sosial berbasis matrilineal, perilaku politik dibentuk tidak hanya oleh faktor rasional atau ekonomi, tetapi juga oleh norma adat dan kepemimpinan tradisional.

Peran *niniak mamak* sebagai pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya terbatas pada ranah budaya, tetapi juga mencakup ranah sosial-politik. *Niniak mamak* sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nagari (desa adat), termasuk dalam menentukan pilihan politik masyarakat, memberikan restu kepada calon legislatif, dan mengarahkan proses musyawarah (Effendi, 2016). Dalam konteks ini, *niniak mamak* tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen yang mempengaruhi dinamika politik lokal.

Sebagai pemimpin adat, *niniak mamak* mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, yang menjadi ciri khas dalam politik Minangkabau. Prinsip ini tidak hanya membentuk cara pengambilan keputusan dalam masyarakat adat, tetapi juga menciptakan sebuah sistem sosial-politik yang mengutamakan konsensus. Musyawarah mufakat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memilih pemimpin, baik dalam konteks pemilihan kepala nagari maupun dalam menentukan pilihan politik pada pemilu. Dalam hal ini, *niniak mamak* berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat.

Selain itu, niniak mamak juga memiliki peran sebagai penengah dalam konflik politik. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau ketegangan dalam masyarakat, niniak mamak dapat bertindak sebagai mediator yang menenangkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, niniak mamak berusaha menjaga keharmonisan dan stabilitas politik di tingkat nagari, sehingga meminimalisir potensi perpecahan yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Arifin dan Gani (2007), budaya politik Minangkabau bersifat partisipatif dan kolektif, di mana keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat dari pemimpin adat. Budaya ini tercermin dalam prinsip "duduak samo randah, tagak samo tinggi," yang menandakan kesetaraan dalam diskusi, tetapi tetap mengakui otoritas moral niniak mamak.

Peran niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya terbatas pada aspek budaya dan sosial, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perilaku politik masyarakat. Sebagai pemimpin adat, niniak mamak memengaruhi bagaimana warga nagari menyikapi dan berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu dan pemilihan umum lainnya. Mereka tidak hanya mengarahkan pilihan politik individu, tetapi juga membentuk pola perilaku politik kolektif masyarakat. Dalam hal ini, niniak mamak berperan sebagai agen pembentuk opini publik yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik komunitas (Effendi, 2016).

Perilaku politik masyarakat Minangkabau cenderung sangat dipengaruhi oleh otoritas niniak mamak, yang dianggap sebagai simbol legitimasi dan kestabilan. Keputusan politik yang diambil dalam musyawarah, yang dipandu oleh niniak mamak, sering kali mencerminkan pola pikir kolektif yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku politik dalam masyarakat Minangkabau lebih berorientasi pada konsensus dan harmoni, dibandingkan dengan individu yang bersifat kompetitif seperti dalam banyak sistem politik modern (Rizal, 2019).

Selain itu, niniak mamak turut mempengaruhi perilaku politik dengan cara mereka memberikan restu atau dukungan kepada calon-calon legislatif atau pemimpin. Proses ini sering kali melibatkan pertimbangan nilai-nilai adat dan kepercayaan tradisional yang dipegang oleh masyarakat. Masyarakat Minangkabau yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan niniak mamak cenderung lebih mengikuti arahan mereka dalam menentukan pilihan politik. Dalam konteks ini, niniak mamak bertindak sebagai mediator antara aspirasi politik masyarakat dan struktur politik formal yang ada (Ismail, 2020).

Keterlibatan niniak mamak dalam politik lokal juga mengindikasikan bahwa perilaku politik di Minangkabau tidak selalu mengutamakan keberhasilan individual, melainkan lebih menekankan pada keberlanjutan nilai-nilai sosial dan kultural. Ini tercermin dalam praktik gotong royong dan musyawarah mufakat yang menjadi bagian integral dari proses politik di nagari. Sebagai pemimpin adat, niniak mamak mengarahkan masyarakat untuk berpikir tentang keselarasan sosial dan bukan sekadar kepentingan politik individu atau kelompok. Oleh karena itu, perilaku politik masyarakat Minangkabau lebih banyak dipengaruhi oleh kolektivisme dibandingkan dengan individualisme (Sulastri, 2017). Dalam perspektif yang lebih luas, peran niniak mamak juga berperan sebagai penghubung antara tradisi dan modernitas dalam politik Minangkabau. Meskipun masyarakat semakin terbuka terhadap ideologi dan sistem politik modern, nilai-nilai adat yang dipegang oleh niniak mamak tetap memberikan arah bagi perilaku politik mereka. Ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi yang terjadi antara struktur sosial tradisional dan dinamika politik yang lebih kontemporer. Peran ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara integritas adat dan tuntutan perkembangan zaman dalam politik Minangkabau (Rizal, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh niniak mamak terhadap perilaku politik masyarakat Minangkabau, baik dalam konteks kontestasi politik elektoral maupun dalam pengambilan keputusan sosial-politik sehari-hari. Penelitian ini relevan untuk memahami dinamika hubungan antara sistem adat dan demokrasi lokal di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna, nilai, dan konteks sosial-politik yang kompleks, khususnya terkait peran niniak mamak dalam membentuk

perilaku politik masyarakat Minangkabau. Metode ini juga sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun membutuhkan pemahaman yang mendalam melalui analisis teks, simbol, serta interaksi sosial (Creswell, 2014). Pendekatan studi literatur digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dokumen adat, hingga artikel dari media yang relevan dengan topik. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis teoretis dan konseptual atas berbagai pemikiran yang telah ada, kemudian diinterpretasikan dalam kerangka perilaku politik masyarakat Minangkabau (Zed, 2004).

C. Hasil dan Pembahasan

Niniak mamak memiliki otoritas dalam memimpin suku dan menjadi penghubung antara adat dan sistem pemerintahan formal. Fungsi sosial-politik mereka tidak terlepas dari kedudukan mereka sebagai elite informal (Mosca, 1939), yang memengaruhi orientasi dan perilaku politik masyarakat melalui petuah dan instruksi yang dihormati. Dalam konteks ini, niniak mamak memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat nagari. Otoritas mereka bukan hanya bersifat simbolis, tetapi juga sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka sering menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat adat dan kebijakan pemerintah formal yang diterapkan di tingkat lokal.

Keberadaan niniak mamak sebagai elite informal memberikan dampak besar terhadap stabilitas politik di tingkat nagari. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil oleh pemerintah lokal di Sumatera Barat tidak jarang memerlukan konsultasi atau persetujuan tidak resmi dari niniak mamak, terutama dalam isu-isu yang menyangkut tanah ulayat, pembangunan fasilitas publik, dan pemilu nagari (Hamidun & Wijayanto, 2021). Dalam hal ini, niniak mamak berperan sebagai penjaga tradisi yang sekaligus mengawasi dinamika sosial-politik di tingkat lokal. Keputusan yang mereka buat tidak hanya berdampak pada masyarakat adat, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam proses pembangunan daerah.

Selain itu, peran niniak mamak dalam proses konsultasi politik memberikan dampak terhadap perilaku politik masyarakat Minangkabau. Masyarakat yang hidup dalam sistem adat Minangkabau cenderung mengutamakan konsensus dalam setiap keputusan politik, dan niniak mamak adalah pihak yang memastikan tercapainya kesepakatan tersebut. Hal ini berimplikasi pada perilaku politik yang lebih kolektif, yang mengutamakan musyawarah mufakat daripada keputusan yang didasarkan pada dominasi suara individu. Dalam konteks ini, niniak mamak memainkan peran sebagai pemimpin yang tidak hanya mengarahkan masyarakat dalam konteks adat, tetapi juga dalam menentukan sikap politik yang lebih bersifat inklusif dan kolektif.

Peran niniak mamak juga berkaitan erat dengan pengaruh mereka dalam menentukan hasil pemilu di tingkat nagari. Sebagai pemimpin yang memiliki otoritas besar, niniak mamak seringkali memiliki pengaruh langsung terhadap calon yang dipilih masyarakat. Oleh karena itu, niniak mamak tidak hanya berfungsi sebagai simbol adat, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam struktur politik lokal yang memengaruhi jalannya pemilihan umum nagari. Dukungan mereka terhadap calon tertentu dapat berpengaruh besar terhadap keberhasilan calon dalam meraih suara masyarakat, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh niniak mamak terhadap perilaku politik di tingkat lokal.

Niniak mamak sebagai elite informal memiliki pengaruh besar terhadap proses politik lokal di Minangkabau. Fungsi mereka yang menghubungkan sistem adat dengan pemerintahan formal memperkuat posisi mereka dalam menentukan kebijakan lokal yang penting, terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak-hak tanah adat dan pembangunan nagari. Perilaku politik masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh pola kolektivitas yang kuat. Dalam praktiknya, niniak mamak sering kali menjadi aktor penghubung antara masyarakat adat dan calon legislatif atau kepala daerah. Kandidat yang ingin mendapatkan dukungan akan mendekati niniak mamak dan memohon restu (Purnama et al., 2021). Restu dari niniak mamak dianggap penting karena mereka bukan hanya pemimpin dalam struktur adat, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang signifikan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, niniak mamak berperan sebagai patron politik yang dapat menentukan arah dukungan masyarakat terhadap kandidat tertentu.

Praktik patronase politik ini sangat terlihat dalam dinamika pemilu dan pemilihan umum di Minangkabau, di mana calon legislatif atau kepala daerah akan mencari dukungan dari niniak mamak sebagai bentuk legitimasi sosial dan politik. Para kandidat tidak hanya bersaing untuk mendapatkan suara masyarakat, tetapi juga untuk mendapatkan restu dari niniak mamak yang dianggap sebagai simbol kehormatan dan kekuatan adat. Restu ini memberikan kekuatan tambahan dalam memperoleh suara masyarakat, mengingat peran niniak mamak yang memiliki otoritas besar dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Minangkabau.

Penelitian oleh Auliya et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam sengketa tanah ulayat, keputusan niniak mamak sering kali menjadi rujukan utama masyarakat dibandingkan keputusan formal dari pengadilan. Hal ini mencerminkan kekuatan simbolik dan fungsional niniak mamak dalam menentukan sikap politik kolektif masyarakat. Keputusan niniak mamak dalam hal tanah ulayat, yang dianggap sebagai bagian dari hak adat, memiliki dampak besar dalam penyelesaian masalah sosial-politik di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan bahwa niniak mamak memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, tidak hanya melalui keputusan yang mengikat secara adat tetapi juga dengan memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Lebih jauh lagi, praktik kolektivitas yang dijaga oleh niniak mamak tercermin dalam cara mereka mengarahkan masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam proses politik. Tidak hanya dalam keputusan politik formal seperti pemilu, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih spesifik seperti sengketa sosial dan masalah tanah adat. Dalam hal ini, niniak mamak berfungsi sebagai mediator yang mengutamakan penyelesaian berbasis musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Dalam sistem politik Minangkabau, kolektivitas dan patronase politik yang terjalin antara niniak mamak dan masyarakat menciptakan sebuah pola hubungan yang saling menguntungkan. Niniak mamak mendapatkan legitimasi sosial dan kekuasaan melalui dukungan mereka terhadap calon-calon tertentu, sementara masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh niniak mamak dalam masalah yang melibatkan hak-hak adat dan tanah ulayat. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara politik lokal dan tradisi adat di Minangkabau, di mana kekuatan simbolik niniak mamak sangat memengaruhi orientasi politik masyarakat.

Peran niniak mamak dalam praktik kolektivitas dan patronase politik menggambarkan bagaimana kekuatan adat dan politik lokal saling terhubung. Niniak mamak tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan arah politik masyarakat melalui pengaruh mereka dalam keputusan-keputusan yang melibatkan kepentingan sosial-politik. Proses musyawarah dalam masyarakat Minangkabau merupakan mekanisme penting dalam pembentukan keputusan politik. Seperti dijelaskan oleh Yauma (2021), struktur musyawarah adat di nagari melibatkan semua unsur masyarakat, tetapi tetap dikendalikan oleh otoritas niniak mamak yang menjadi penengah sekaligus pengarah keputusan akhir. Dalam sistem ini, meskipun setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, keputusan akhir biasanya tetap dipengaruhi oleh pertimbangan dan petuah dari niniak mamak. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya posisi niniak mamak dalam menjaga harmoni sosial dan kebijakan yang disepakati bersama.

Musyawarah sebagai mekanisme politik lokal memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam budaya politik Minangkabau. Proses ini tidak hanya mencakup diskusi mengenai masalah adat, tetapi juga terkait erat dengan keputusan-keputusan politik, baik itu pemilu, pemilihan kepala daerah, maupun isu-isu sosial lainnya. Musyawarah ini berfungsi sebagai sarana untuk mencapai konsensus, di mana kepentingan individu atau kelompok harus dikompromikan untuk kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat Minangkabau, yaitu musyawarah mufakat, yang menekankan pada kesepakatan bersama sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah politik dan sosial (Yauma, 2021). Dalam konteks pemilu, proses musyawarah ini terlihat ketika masyarakat melakukan diskusi bersama sebelum menentukan dukungan terhadap calon tertentu. Kandidat yang disetujui oleh niniak mamak biasanya memperoleh dukungan luas di kalangan masyarakat (Arrazak et al., 2023). Dukungan ini bukan hanya diperoleh melalui propaganda atau kampanye politik yang dilakukan oleh calon tersebut, tetapi lebih melalui pengaruh niniak mamak yang menjadi pemimpin opini dan penentu arah politik masyarakat. Sehingga, meskipun proses musyawarah mengutamakan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan, keputusan akhir mengenai

dukungan politik sering kali dipengaruhi oleh otoritas niniak mamak yang dianggap sebagai figur pemimpin dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Di luar pemilu, musyawarah juga berperan penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai masalah sosial, seperti pembangunan desa atau penyelesaian konflik adat. Dalam hal ini, niniak mamak berperan sebagai pengarah musyawarah yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, sembari tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat. Proses ini memungkinkan masyarakat Minangkabau untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, meskipun menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Dengan demikian, musyawarah sebagai mekanisme politik lokal bukan hanya sebuah proses administratif, tetapi juga cerminan dari budaya kolektivisme yang kuat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, niniak mamak memainkan peran ganda sebagai pemimpin adat dan pengarah keputusan politik yang tetap mengedepankan musyawarah dan konsensus dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik.

Proses musyawarah sebagai mekanisme politik lokal di Minangkabau menggambarkan bagaimana keputusan politik tidak hanya dipengaruhi oleh suara individu, tetapi lebih mengutamakan kesepakatan bersama yang dipimpin oleh niniak mamak sebagai pemimpin adat. Legitimasi yang dimiliki oleh niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau tidak semata-mata bersumber dari kedudukan struktural mereka dalam sistem adat, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan kepercayaan kolektif yang ditanamkan secara turun-temurun. Niniak mamak dipandang sebagai figur panutan yang tidak hanya memahami adat istiadat, tetapi juga menjaga etika sosial dan keseimbangan kehidupan masyarakat. Menurut Salsabila (2021), dalam berbagai kasus perselisihan rumah tangga, masyarakat Minangkabau lebih memilih mendengarkan nasihat niniak mamak daripada menyelesaikan konflik melalui lembaga hukum formal. Ini menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat terhadap peran simbolik dan moral dari niniak mamak sebagai penjaga harmoni sosial. Dalam konteks perilaku politik, legitimasi simbolik ini berperan besar dalam membentuk orientasi dan sikap politik masyarakat. Niniak mamak yang memiliki pengaruh moral dipercaya mampu memberikan panduan dalam menentukan pilihan politik yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, ketika niniak mamak memberikan restu terhadap seorang kandidat politik, restu tersebut tidak hanya dimaknai secara politik, tetapi juga sebagai bentuk moral approval yang memperkuat legitimasi kandidat di mata masyarakat. Pengaruh ini menempatkan niniak mamak sebagai kekuatan simbolik yang menjadi rujukan dalam membangun konsensus politik di tingkat lokal.

Legitimasi tersebut juga memungkinkan niniak mamak untuk memainkan peran sebagai penengah dalam konflik politik atau perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat. Karena status mereka dihormati oleh semua pihak, intervensi niniak mamak dalam konflik sering kali diterima dengan baik dan dianggap adil. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai kekuatan mediasi yang menjaga kohesi sosial, sekaligus memastikan bahwa proses politik berlangsung secara damai dan sesuai dengan norma kolektif yang berlaku. Lebih jauh lagi, kekuatan simbolik niniak mamak ini menjadi aset penting dalam menjaga integrasi antara struktur politik formal dan nilai-nilai adat lokal. Dalam banyak kasus, aktor politik formal seperti kepala nagari atau anggota legislatif lokal berusaha merangkul niniak mamak demi mendapatkan dukungan yang sah secara adat dan sosial. Dukungan ini memiliki nilai strategis karena dapat menstabilkan basis dukungan masyarakat dan meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik mereka. Dengan demikian, kekuatan simbolik niniak mamak bukan hanya berpengaruh dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga sangat menentukan dalam pembentukan perilaku politik masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai moral, nasihat adat, dan pengaruh kultural yang mereka miliki menjadi dasar kuat dalam membangun legitimasi politik berbasis adat dan kearifan lokal.

Legitimasi simbolik niniak mamak dalam masyarakat Minangkabau memperkuat pengaruh mereka dalam berbagai aspek, termasuk dalam membentuk perilaku politik yang berakar pada nilai moral dan kepercayaan adat. Begitu pula dalam politik, masyarakat cenderung menganggap keputusan politik yang direkomendasikan niniak mamak sebagai lebih sah dan patut diikuti. Hal ini menegaskan bahwa perilaku politik masyarakat Minangkabau merupakan hasil dari proses internalisasi norma-norma adat dalam kehidupan politik sehari-hari.

D. Penutup

Perilaku politik masyarakat Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari peran sentral niniak mamak sebagai elite adat yang memiliki kekuasaan baik secara struktural maupun simbolik. Dalam setiap aspek kehidupan sosial-politik, niniak mamak memegang posisi penting sebagai penjaga nilai-nilai adat, penengah konflik, dan pengarah sikap kolektif masyarakat. Hal ini menjadikan mereka aktor kunci dalam proses pembentukan perilaku politik yang khas, yaitu berbasis musyawarah, kolektivitas, dan kepercayaan terhadap kepemimpinan tradisional. Peran ini semakin relevan ketika masyarakat menghadapi dinamika politik modern yang kompleks dan terkadang menjauh dari nilai-nilai lokal. Dalam konteks demokrasi lokal, niniak mamak turut memfasilitasi terciptanya partisipasi politik yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal. Mereka tidak hanya menjadi figur pemimpin dalam proses musyawarah, tetapi juga berperan sebagai pemberi legitimasi terhadap calon legislatif, kepala daerah, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Legitimasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sangat fungsional dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses politik. Dengan demikian, keterlibatan niniak mamak mampu meningkatkan efektivitas demokrasi lokal dengan menyatukan nilai-nilai tradisi dan tuntutan sistem politik modern. Pengaruh niniak mamak dalam politik lokal juga memperlihatkan adanya interaksi yang dinamis antara struktur adat dan sistem pemerintahan formal. Bukannya saling menegasikan, kedua sistem ini dapat saling memperkuat jika dijalankan secara harmonis. Ketika lembaga pemerintahan formal melibatkan unsur adat dalam pengambilan keputusan, hasil kebijakan akan lebih diterima masyarakat karena memiliki dasar legitimasi sosial yang kuat. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, penyelesaian konflik agraria seperti tanah ulayat, serta pelaksanaan pemilu nagari yang adil dan partisipatif. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan untuk tidak mengabaikan eksistensi dan fungsi strategis lembaga adat, khususnya niniak mamak, dalam proses pembangunan politik. Keterlibatan aktif lembaga adat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial budaya dalam kehidupan demokrasi lokal. Dengan mengintegrasikan mekanisme adat ke dalam sistem pemerintahan, Indonesia, khususnya Sumatera Barat, dapat mengembangkan model demokrasi lokal yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berakar pada identitas kultural masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z., & Gani, M. H. (2007). Relasi dua kepentingan (Budaya politik masyarakat Minangkabau). *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 8(3).
- Arrazak, M. A., Syamsir, S., Utama, A. W., & Fauza, F. (2023). Peranan kepemimpinan niniak mamak dalam pelestarian budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 4(2), 83–94.
- Auliya, M., Siregar, A., & Hidayat, N. (2023). *Pengaruh Niniak Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Minangkabau*. *Jurnal Hukum Adat*, 10(2), 78-91.
- Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh niniak mamak di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 200–210.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Effendi, N. (2016). Budaya politik khas Minangkabau sebagai alternatif budaya politik di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 75–88.
- Hamidun, A., & Wijayanto, E. (2021). *Kebijakan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat: Peran Niniak Mamak dalam Pembangunan dan Pemilu Nagari*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 15(2), 112-124.
- Hamidun, A., & Wijayanto. (2021). Peran niniak mamak (kepala suku) terhadap perumusan kebijakan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1–9.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. McGraw-Hill.
- Purnama, G., Putra, E. V., & Fitriani, E. (2021). Peran niniak mamak dalam pilkada. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 3(2), 136–144.

- Purnama, T., Syamsul, H., & Rahman, S. (2021). *Patronase Politik dalam Pemilihan Umum di Minangkabau: Peran Niniak Mamak sebagai Penghubung Masyarakat dan Kandidat Politik*. Jurnal Politik dan Sosial, 17(1), 45-60.
- Salsabila, Y. (2021). Peran niniak mamak dalam penyelesaian persengketaan rumah tangga anak kemenakan di Nagari Palupuah Agam. *Ragam Tradisi Nusantara*, 53.
- Yauma, S. (2021). Legitimasi institusi nagari (Studi atas institusi nagari di Kenagarian Tigo Balai Provinsi Sumatera Barat) [Disertasi, Universitas Andalas]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.